

Analisis Prinsip Keberlanjutan dalam Pengelolaan dan Pelaporan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS): Studi Kasus di SMA IT Insan Harapan

Mujadidah Ma'rufah^{1*}, Fista Apriani Sujaya², Ade Trisyanto³

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi, Universitas Buana Perjuangan Karawang
ak19.mujadidahmarufah@mhs.ubpkarawang.ac.id*



e-ISSN: 2987-811X

MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin

<https://ejournal.lumbungpare.org/index.php/maras>

Vol. 4 No. 4 Desember 2026

Page: 1440-1454

Article History:

Received: 28-08-2026

Accepted: 20-10-2026

Abstrak : Penelitian ini menganalisis penerapan prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan dan pelaporan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMA IT Insan Harapan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumen terkait perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, serta pelaporan Dana BOS. Analisis dilakukan menggunakan kerangka manajemen Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling (POAC), teori stakeholder, serta tiga dimensi keberlanjutan, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Dana BOS telah didukung oleh perencanaan berbasis kebutuhan sekolah, pencatatan administratif, dan penggunaan aplikasi ARKAS. Transparansi dan akuntabilitas juga telah diterapkan melalui penyampaian informasi mengenai program dan penggunaan dana kepada pemangku kepentingan. Namun, keterlibatan komite sekolah dalam perencanaan dan pengawasan masih terbatas, sedangkan penyajian informasi keuangan kepada orang tua dan pemangku kepentingan nonkeuangan perlu ditingkatkan. Dalam perspektif keberlanjutan, penggunaan Dana BOS diarahkan untuk memenuhi kebutuhan operasional sekolah, mendukung kegiatan pembelajaran, dan memelihara fasilitas pendidikan. Namun, efisiensi penggunaan dana dan dampak jangka panjang program belum dapat dinilai secara terukur karena keterbatasan indikator dan dokumentasi hasil. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan transparansi, partisipasi pemangku kepentingan, dan evaluasi manfaat program agar pengelolaan Dana BOS tidak hanya berorientasi pada kepatuhan administratif, tetapi juga pada keberlanjutan layanan pendidikan.

Kata Kunci : Dana BOS; Laporan Keberlanjutan; Pengelolaan Keuangan Sekolah; Transparansi; Akuntabilitas

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu sektor strategis dalam pembangunan nasional karena berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperluas kesempatan masyarakat untuk memperoleh layanan pendidikan yang layak. Untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan, pemerintah menyediakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagai salah satu instrumen pembiayaan operasional satuan pendidikan. Dana BOS digunakan untuk mendukung berbagai kebutuhan sekolah, antara lain pelaksanaan kegiatan pembelajaran, penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan kompetensi pendidik, serta kegiatan operasional lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2023). Mengingat dana tersebut merupakan sumber daya publik yang penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan, pengelolaan Dana BOS perlu dilaksanakan secara terencana, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, keberhasilan pengelolaan Dana BOS tidak hanya berkaitan dengan ketepatan pencatatan dan penyusunan laporan, tetapi juga dengan kesesuaian penggunaan dana terhadap kebutuhan sekolah dan manfaatnya bagi penyelenggaraan pendidikan.

Transparansi dan akuntabilitas menjadi unsur penting dalam tata kelola keuangan sekolah karena keduanya memungkinkan pemangku kepentingan mengetahui bagaimana anggaran direncanakan, digunakan, dan dipertanggungjawabkan. Transparansi tidak cukup dimaknai sebagai tersedianya dokumen keuangan atau penyampaian informasi secara formal, tetapi juga mencakup kemudahan akses, kejelasan informasi, dan kemampuan pihak yang berkepentingan untuk memahami penggunaan dana. Sementara itu, akuntabilitas berkaitan dengan kewajiban pengelola untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan keputusan serta penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya (Mardiasmo, 2023). Dalam konteks sekolah, penerapan kedua prinsip tersebut perlu memperhatikan kebutuhan informasi kepala sekolah, bendahara, guru, komite sekolah, orang tua, dan pihak lain yang berkepentingan. Perbedaan peran dan kebutuhan informasi antarpihak dapat memengaruhi bagaimana keterbukaan dan pertanggungjawaban pengelolaan Dana BOS dipahami serta dilaksanakan.

Di samping aspek administratif dan keuangan, pengelolaan Dana BOS juga perlu dipahami dari perspektif keberlanjutan. Keberlanjutan dalam penyelenggaraan pendidikan berkaitan dengan kemampuan sekolah mempertahankan layanan dan program yang bermanfaat, memanfaatkan sumber daya secara bertanggung jawab, serta memperhatikan konsekuensi sosial dan lingkungan dari kegiatan yang dilaksanakan. Perspektif ini memperluas penilaian pengelolaan dana dari sekadar kesesuaian antara anggaran dan realisasi menuju perhatian terhadap manfaat program bagi warga sekolah dan keberlangsungan layanan pendidikan. Kerangka pelaporan keberlanjutan yang dikembangkan oleh Global Reporting Initiative (GRI) dapat digunakan sebagai salah satu rujukan konseptual untuk menelaah informasi mengenai aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan organisasi (Global Reporting Initiative, 2021, 2023). Dalam penelitian ini, kerangka tersebut digunakan sebagai lensa analisis untuk memahami praktik yang berkaitan dengan keberlanjutan, bukan untuk menyatakan bahwa sekolah wajib menerapkan seluruh standar GRI atau telah memenuhi seluruh persyaratannya.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas pentingnya tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana BOS. Sine et al. (2021), misalnya, mengkaji akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Dana BOS pada sekolah di Kota Kupang. Permata dan Mustoffa (2023) membahas penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Dana BOS yang berkaitan dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), sedangkan Fadhilah et al. (2023) menempatkan tata kelola sekolah sebagai salah satu aspek yang relevan dalam efektivitas pengelolaan Dana BOS. Kajian-kajian tersebut memberikan landasan untuk memahami bahwa pengelolaan Dana BOS tidak dapat dilepaskan dari mekanisme perencanaan, pencatatan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Di sisi lain, penelitian mengenai pelaporan keberlanjutan menunjukkan pentingnya pengungkapan informasi yang dapat membantu pemangku kepentingan memahami praktik dan tanggung jawab organisasi (Brown et al., 2009). Lozano et al. (2015) juga membahas pelaporan keberlanjutan dalam konteks pendidikan tinggi, termasuk keterkaitannya dengan perubahan organisasi. Meskipun konteks pendidikan tinggi berbeda dengan sekolah menengah, kajian tersebut dapat menjadi rujukan konseptual untuk mempertimbangkan bagaimana informasi mengenai keberlanjutan dapat dikembangkan sesuai karakteristik lembaga pendidikan.

Berdasarkan kajian tersebut, masih terdapat ruang untuk memahami secara lebih mendalam bagaimana pengelolaan Dana BOS dijalankan dalam konteks sekolah tertentu ketika ditelaah secara bersamaan melalui fungsi manajemen, keterlibatan pemangku kepentingan, dan dimensi keberlanjutan. Penilaian yang hanya berfokus pada kepatuhan administratif belum tentu memberikan gambaran lengkap mengenai bagaimana informasi keuangan disampaikan dan dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan, sejauh mana mereka dilibatkan dalam proses pengelolaan, serta bagaimana manfaat program pendidikan didokumentasikan. Selain itu, penerapan perspektif keberlanjutan pada pengelolaan Dana BOS perlu mempertimbangkan ketersediaan data dan karakteristik satuan pendidikan. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji praktik pengelolaan dan pelaporan Dana BOS secara kontekstual, dengan memperhatikan proses tata kelola serta keterkaitannya dengan keberlanjutan layanan pendidikan.

Penelitian ini menggunakan kerangka manajemen *Planning, Organizing, Actuating*, dan *Controlling* (POAC) untuk menganalisis proses pengelolaan Dana BOS, teori stakeholder untuk memahami peran dan keterlibatan pihak-pihak yang berkepentingan, serta dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan sebagai kerangka analisis keberlanjutan. Integrasi ketiga perspektif tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai hubungan antara proses pengelolaan anggaran, keterbukaan informasi, pertanggungjawaban, dan manfaat program pendidikan. Fokus penelitian pada SMA IT Insan Harapan juga memungkinkan praktik pengelolaan Dana BOS dikaji berdasarkan konteks kelembagaan dan pengalaman para pihak yang terlibat, tanpa menggeneralisasi temuan secara langsung kepada seluruh sekolah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan dan pelaporan Dana BOS di SMA IT Insan Harapan. Secara khusus, penelitian ini menjawab tiga pertanyaan: (1) bagaimana kontribusi penggunaan Dana BOS terhadap keberlanjutan program pendidikan dan

kendala apa yang dihadapi dalam pengembangan prinsip pelaporan keberlanjutan; (2) bagaimana transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan pemangku kepentingan diterapkan dalam pengelolaan Dana BOS; serta (3) bagaimana proses pelaporan Dana BOS dilaksanakan di SMA IT Insan Harapan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi kajian tata kelola keuangan pendidikan dan pelaporan keberlanjutan, sekaligus menjadi bahan pertimbangan praktis bagi sekolah dalam meningkatkan keterbukaan informasi, partisipasi pemangku kepentingan, serta dokumentasi manfaat program pendidikan secara berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk menganalisis penerapan prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan dan pelaporan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMA IT Insan Harapan. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memahami secara mendalam proses pengelolaan dana, praktik transparansi dan akuntabilitas, keterlibatan pemangku kepentingan, serta penerapan dimensi keberlanjutan dalam penyelenggaraan program pendidikan. Desain studi kasus digunakan untuk mengkaji fenomena tersebut secara kontekstual berdasarkan praktik pengelolaan Dana BOS pada satuan pendidikan yang menjadi objek penelitian.

Penelitian dilaksanakan di SMA IT Insan Harapan dengan fokus pada pengelolaan dan pelaporan Dana BOS, meliputi perencanaan anggaran, pelaksanaan kegiatan, penatausahaan, pengawasan, serta penyampaian informasi kepada pemangku kepentingan. Analisis juga diarahkan pada tiga dimensi keberlanjutan, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan, dengan mengacu pada prinsip pelaporan keberlanjutan yang dikembangkan oleh Global Reporting Initiative (GRI). Dalam menganalisis proses manajemen, penelitian ini menggunakan kerangka *Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling* (POAC), sedangkan teori *stakeholder* digunakan untuk memahami peran, kepentingan, dan keterlibatan pihak-pihak yang berkaitan dengan pengelolaan Dana BOS.

Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan mereka dalam pengelolaan maupun pemanfaatan Dana BOS. Informan yang menjadi sasaran penelitian meliputi kepala sekolah, bendahara atau pengelola Dana BOS, wakil kepala sekolah, guru, komite sekolah, serta orang tua atau wali siswa. Kepala sekolah dan bendahara dipilih untuk memperoleh informasi mengenai kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran. Wakil kepala sekolah dan guru memberikan informasi mengenai kebutuhan pembelajaran serta manfaat program yang didanai. Komite sekolah dan orang tua atau wali siswa memberikan perspektif mengenai transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan manfaat penggunaan dana bagi warga sekolah. Jumlah informan dan karakteristiknya ditetapkan berdasarkan data aktual penelitian.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap praktik pengelolaan Dana BOS serta pelaksanaan program pendidikan yang relevan. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman pertanyaan yang berfokus pada proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pengawasan, transparansi, akuntabilitas, keterlibatan

pemangku kepentingan, dan manfaat program pendidikan. Observasi digunakan untuk memahami pelaksanaan kegiatan dan praktik pengelolaan sumber daya yang dapat diamati secara langsung. Data sekunder diperoleh melalui penelaahan dokumen yang relevan, seperti Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), dokumen atau catatan pada Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS), laporan realisasi Dana BOS, bukti transaksi, laporan pertanggungjawaban, serta dokumen pendukung kegiatan pendidikan. Penelaahan dokumen dilakukan sesuai ketersediaan dan izin akses terhadap dokumen penelitian.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Pada tahap kondensasi, data wawancara, observasi, dan dokumen dipilah serta dikelompokkan berdasarkan tema penelitian. Tahap penyajian data dilakukan dengan menyusun uraian naratif dan matriks temuan yang menghubungkan informasi dari berbagai sumber dengan indikator penelitian. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengidentifikasi pola, persamaan, perbedaan, dan keterkaitan antartemuan untuk menjelaskan praktik pengelolaan Dana BOS dan penerapan prinsip keberlanjutan di sekolah.

Kerangka analisis penelitian mencakup empat fungsi manajemen POAC dan tiga dimensi keberlanjutan. Dimensi ekonomi dianalisis melalui kesesuaian penggunaan dana dengan kebutuhan dan perencanaan, efisiensi pemanfaatan anggaran, serta manfaat penggunaan dana bagi kegiatan pendidikan. Dimensi sosial dianalisis melalui manfaat program bagi siswa dan guru, dukungan terhadap proses pembelajaran, pemerataan layanan, serta keterlibatan pemangku kepentingan. Dimensi lingkungan dianalisis melalui praktik pemeliharaan fasilitas, efisiensi penggunaan sumber daya, dan kegiatan pengelolaan lingkungan sekolah yang relevan dengan penggunaan Dana BOS. Ketiga dimensi tersebut digunakan sebagai kerangka analitis untuk mengidentifikasi praktik yang mendukung keberlanjutan, bukan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa sekolah telah memenuhi seluruh persyaratan pelaporan GRI.

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari kepala sekolah, bendahara, guru, komite sekolah, dan orang tua atau wali siswa. Triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dengan observasi dan dokumen yang tersedia. Perbedaan informasi antarsumber dianalisis secara kritis untuk memperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai praktik pengelolaan Dana BOS. Kesimpulan penelitian disusun berdasarkan bukti yang dapat ditelusuri dari sumber data yang digunakan.

Melalui tahapan tersebut, penelitian diharapkan menghasilkan gambaran yang mendalam mengenai pengelolaan dan pelaporan Dana BOS, tingkat transparansi dan akuntabilitas, pola keterlibatan pemangku kepentingan, serta peluang pengembangan prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan program pendidikan di SMA IT Insan Harapan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengkaji pengelolaan dan pelaporan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMA IT Insan Harapan dengan menggunakan kerangka fungsi manajemen *Planning, Organizing, Actuating*, dan *Controlling* (POAC), serta tiga

dimensi keberlanjutan, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Berdasarkan uraian hasil wawancara, observasi, dan dokumen yang disebutkan dalam penelitian, temuan menunjukkan bahwa pengelolaan Dana BOS telah diarahkan pada pemenuhan kebutuhan operasional sekolah dan pertanggungjawaban administratif. Namun, keterlibatan pemangku kepentingan belum merata dan pelaporan dampak sosial serta lingkungan belum disajikan secara terstruktur dalam laporan keberlanjutan tersendiri.

Pengelolaan Dana BOS

1. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan penggunaan Dana BOS di SMA IT Insan Harapan dilakukan melalui identifikasi kebutuhan sekolah dan penyesuaiannya dengan program pendidikan yang direncanakan. Kebutuhan tersebut mencakup kegiatan pembelajaran, perkembangan peserta didik, pemeliharaan sarana dan prasarana, serta kebutuhan operasional lainnya. Penentuan prioritas anggaran mempertimbangkan tingkat kebutuhan dan relevansinya terhadap penyelenggaraan pendidikan.

Kepala sekolah menjelaskan bahwa penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) didasarkan pada program dan kebutuhan sekolah. Sementara itu, bendahara BOS menyampaikan bahwa penyusunan anggaran mempertimbangkan kebutuhan media pembelajaran, pemeliharaan sarana dan prasarana, daya dan jasa, kegiatan ekstrakurikuler, serta honorarium sesuai ketentuan penggunaan Dana BOS. Guru juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan kebutuhan pembelajaran sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan rencana anggaran.

Meskipun terdapat keterlibatan guru dalam penyampaian kebutuhan, informasi mengenai peran komite sekolah menunjukkan perbedaan. Kepala sekolah menyatakan bahwa komite dilibatkan dalam memberikan masukan terkait pengelolaan Dana BOS, sedangkan pihak komite menyampaikan bahwa mereka tidak terlibat langsung dalam penyusunan RKAS. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa pemberian masukan dan keterlibatan dalam penyusunan anggaran merupakan dua bentuk partisipasi yang perlu dibedakan.

Dengan demikian, perencanaan Dana BOS telah berorientasi pada kebutuhan operasional dan program pendidikan. Akan tetapi, partisipasi pemangku kepentingan dalam proses perencanaan belum sepenuhnya merata. Temuan ini mengindikasikan perlunya penjelasan yang lebih terstruktur mengenai mekanisme penyampaian usulan, penentuan prioritas, dan pelibatan komite sekolah dalam proses perencanaan.

2. Pelaksanaan (*Actuating*)

Pelaksanaan penggunaan Dana BOS mengacu pada RKAS yang telah ditetapkan. Berdasarkan uraian wawancara dalam naskah, pengelola memperhatikan kesesuaian kegiatan dengan rencana anggaran, ketersediaan anggaran, kesesuaian jenis pengeluaran dengan ketentuan, serta kelengkapan dokumen pendukung. Apabila terdapat transaksi yang memerlukan klarifikasi, pengelola melakukan pemeriksaan atau konsultasi sebelum mengambil keputusan. Perubahan kebutuhan sekolah juga disebutkan perlu disesuaikan melalui mekanisme yang berlaku, bukan melalui pengeluaran tanpa perencanaan.

Dari sisi penerima manfaat, guru menyampaikan bahwa Dana BOS membantu penyediaan kebutuhan pembelajaran dan mendukung pelaksanaan kegiatan sekolah. Orang tua atau wali siswa juga merasakan manfaat program yang didanai, terutama melalui tersedianya kegiatan pembelajaran, fasilitas, dan program pendukung bagi peserta didik.

Keterangan dari pengelola dan penerima manfaat tersebut memperlihatkan adanya keterkaitan antara perencanaan anggaran dan pelaksanaan program pendidikan. Namun, pernyataan mengenai manfaat yang dirasakan belum dengan sendirinya membuktikan tingkat efisiensi penggunaan dana atau besarnya peningkatan mutu pembelajaran. Penilaian terhadap aspek tersebut memerlukan bukti tambahan, seperti perbandingan antara rencana dan realisasi anggaran, dokumen pelaksanaan kegiatan, atau indikator hasil program yang dapat ditelusuri.

3. Penatausahaan

Penatausahaan Dana BOS dilakukan melalui pencatatan transaksi dan pengumpulan dokumen pendukung, seperti nota, kuitansi, dan faktur. Bendahara BOS menjelaskan bahwa pencatatan diupayakan dilakukan secara rutin setelah transaksi berlangsung. Data transaksi kemudian dicocokkan berdasarkan tanggal, jenis transaksi, nominal, tujuan pengeluaran, dan dokumen pendukung yang tersedia.

Penggunaan Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) mendukung proses perencanaan anggaran, pencatatan realisasi, dan penyusunan laporan. Meskipun demikian, penggunaan aplikasi tetap membutuhkan ketelitian agar data yang dimasukkan sesuai dengan dokumen transaksi. Kepala sekolah dan bendahara juga menekankan pentingnya konsistensi antara catatan dalam aplikasi dan dokumen fisik.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa penatausahaan Dana BOS mengandalkan pencatatan transaksi, kelengkapan bukti, dan pemanfaatan sistem administrasi. Akan tetapi, keberadaan dokumen dan penggunaan aplikasi belum cukup untuk menyimpulkan bahwa seluruh transaksi telah sesuai tanpa kesalahan. Kesimpulan mengenai tingkat kepatuhan dan ketepatan pencatatan perlu didukung pemeriksaan terhadap sampel transaksi, laporan realisasi, serta dokumen pertanggungjawaban yang relevan.

4. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan penggunaan Dana BOS dilakukan melalui pemeriksaan dokumen transaksi, pencocokan antara rencana dan realisasi anggaran, serta evaluasi internal oleh kepala sekolah dan bendahara. Mekanisme ini ditujukan untuk memastikan bahwa penggunaan dana memiliki dasar perencanaan dan didukung oleh dokumen pertanggungjawaban.

Keterlibatan komite sekolah dalam pengawasan masih cenderung terbatas. Komite menyampaikan bahwa pengawasan dilakukan melalui komunikasi dengan pihak sekolah. Keterangan ini menunjukkan bahwa peran komite lebih banyak berkaitan dengan penerimaan informasi dan komunikasi mengenai program daripada pemeriksaan langsung atas dokumen keuangan.

Berdasarkan temuan tersebut, fungsi pengawasan internal telah dijelaskan melalui aktivitas pemeriksaan dan pencocokan dokumen. Sementara itu, pengawasan oleh komite belum tergambarkan sebagai pemeriksaan substantif

terhadap transaksi. Kondisi ini menunjukkan adanya ruang untuk memperkuat keterlibatan komite melalui mekanisme penyampaian informasi yang lebih teratur dan kesempatan memberikan masukan terhadap pelaksanaan program.

Meskipun demikian, terbatasnya keterlibatan komite dalam pemeriksaan dokumen tidak dapat langsung diartikan sebagai tidak adanya pengawasan atau terjadinya penyimpangan. Penilaian mengenai efektivitas pengawasan perlu mempertimbangkan prosedur yang berlaku, dokumen yang diperiksa, serta bukti pelaksanaan pengawasan yang tersedia.

Pelaporan, Transparansi, dan Akuntabilitas Dana BOS

Pelaporan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMA IT Insan Harapan meliputi pencatatan transaksi, penyusunan laporan realisasi anggaran, dan pengumpulan dokumen pendukung. Berdasarkan uraian hasil wawancara dalam penelitian, bendahara mengumpulkan bukti transaksi, mencocokkan penggunaan dana dengan rencana dan realisasi anggaran, kemudian menyusun laporan sesuai dengan format yang ditetapkan. Sebelum laporan disampaikan, dilakukan pemeriksaan internal oleh pengelola dan kepala sekolah.

Kendala yang ditemukan dalam proses pelaporan meliputi kelengkapan bukti transaksi, penyesuaian antara rencana dan kebutuhan aktual, keterbatasan waktu, serta ketelitian dalam memasukkan data ke Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS). Upaya penanganan dilakukan melalui pemeriksaan dokumen secara berkala, koordinasi antara bendahara dan penanggung jawab kegiatan, serta konsultasi apabila terdapat ketentuan yang memerlukan penjelasan lebih lanjut.

Dari aspek akuntabilitas, keberadaan rencana anggaran, bukti transaksi, dokumen kegiatan, dan laporan realisasi merupakan bagian penting dari mekanisme pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS. Bendahara menjelaskan bahwa proses pelaporan didukung oleh pencatatan dan dokumentasi transaksi. Komite sekolah juga menyampaikan bahwa penggunaan dana pada prinsipnya dapat dipertanggungjawabkan apabila setiap transaksi memiliki bukti pendukung, sesuai dengan rencana, dan dilaporkan melalui mekanisme yang ditetapkan. Komite menilai bahwa kepercayaan terhadap pengelolaan Dana BOS perlu dipertahankan melalui keterbukaan informasi dan konsistensi pertanggungjawaban.

Meskipun demikian, keberadaan dokumen dan mekanisme pelaporan belum dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh transaksi telah sesuai tanpa kesalahan. Penilaian mengenai tingkat kepatuhan dan ketepatan pencatatan tetap memerlukan pemeriksaan terhadap laporan realisasi, sampel transaksi, dan dokumen pertanggungjawaban yang relevan. Oleh karena itu, temuan penelitian ini menunjukkan adanya mekanisme administratif yang mendukung akuntabilitas, tetapi tidak dapat diperlakukan sebagai hasil audit atas seluruh transaksi Dana BOS.

Dari aspek transparansi, informasi mengenai program dan penggunaan Dana BOS disampaikan melalui rapat internal, forum pembahasan program, pertemuan orang tua, dan komunikasi resmi sekolah. Guru menyatakan bahwa informasi mengenai program yang berkaitan langsung dengan pembelajaran cukup terbuka. Orang tua atau wali siswa juga dapat memahami manfaat program yang dirasakan peserta didik, tetapi masih memerlukan penjelasan tambahan untuk memahami rincian komponen anggaran. Sementara itu, komite sekolah menilai bahwa

penyampaian informasi telah dilakukan, tetapi penyajiannya masih perlu ditingkatkan agar lebih mudah diakses dan dipahami.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa transparansi di SMA IT Insan Harapan telah diwujudkan melalui penyampaian informasi mengenai program dan penggunaan dana secara umum. Namun, keterbukaan informasi belum sepenuhnya menjamin bahwa seluruh pemangku kepentingan memahami rincian anggaran. Perbedaan kebutuhan informasi antara pengelola sekolah, guru, komite, dan orang tua perlu menjadi pertimbangan dalam penyusunan informasi keuangan.

Dengan demikian, peningkatan transparansi dapat dilakukan melalui penyajian ringkasan anggaran dan realisasi yang lebih sederhana, teratur, dan mudah dipahami. Informasi tersebut sebaiknya memuat program yang dibiayai, tujuan penggunaan dana, serta manfaat program bagi peserta didik. Penyampaian informasi tetap harus memperhatikan ketentuan pengelolaan Dana BOS dan perlindungan informasi yang tidak semestinya dipublikasikan.

Keterlibatan *Stakeholder*

Keterlibatan pemangku kepentingan dalam pengelolaan Dana BOS di SMA IT Insan Harapan menunjukkan pola yang berbeda berdasarkan peran masing-masing. Guru memiliki kesempatan menyampaikan kebutuhan pembelajaran sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Komite sekolah memberikan masukan mengenai prioritas program, kebutuhan siswa, dan manfaat kegiatan, tetapi tidak terlibat secara langsung dalam penyusunan RKAS maupun pengelolaan teknis dana. Sementara itu, orang tua atau wali siswa lebih banyak menyampaikan masukan melalui wali kelas atau forum komunikasi sekolah terkait kebutuhan siswa dan kualitas layanan pendidikan.

Pola tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan pemangku kepentingan belum merata pada seluruh tahapan pengelolaan Dana BOS. Sebagian pihak terlibat dalam penyampaian kebutuhan dan penerimaan informasi, sedangkan perencanaan anggaran dan pengelolaan teknis lebih banyak dilakukan oleh pihak internal sekolah. Kondisi ini perlu dipahami dengan mempertimbangkan perbedaan tanggung jawab, kewenangan, dan kepentingan masing-masing pihak.

Dalam perspektif teori *stakeholder*, organisasi perlu memperhatikan kepentingan pihak-pihak yang memengaruhi atau terdampak oleh keputusan organisasi. Peng et al. (2024) menekankan pentingnya keterlibatan pemangku kepentingan dalam mendukung akuntabilitas, inklusivitas, pengambilan keputusan, dan peningkatan kualitas pendidikan. Perspektif ini relevan dengan pengelolaan Dana BOS karena penggunaan dana tidak hanya berkaitan dengan tanggung jawab administratif pengelola, tetapi juga dengan kebutuhan siswa, guru, orang tua, dan masyarakat.

Perbedaan kebutuhan informasi juga menjelaskan mengapa penyampaian informasi yang sama belum tentu menghasilkan tingkat pemahaman yang sama pada setiap kelompok pemangku kepentingan. Pengelola sekolah membutuhkan informasi yang berkaitan dengan ketepatan anggaran dan kelengkapan administrasi, sedangkan guru dan orang tua lebih membutuhkan informasi tentang manfaat program, ketersediaan fasilitas pembelajaran, dan dampak penggunaan dana terhadap layanan pendidikan.

Oleh karena itu, partisipasi pemangku kepentingan perlu diperkuat melalui mekanisme penyampaian kebutuhan, pembahasan prioritas program, penerimaan informasi mengenai realisasi anggaran, dan pemberian masukan terhadap manfaat program. Penguatan partisipasi tersebut perlu tetap memperhatikan peran dan kewenangan masing-masing pihak sehingga tidak mengaburkan pembagian tanggung jawab dalam pengelolaan Dana BOS.

Penerapan Prinsip Laporan Keberlanjutan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa SMA IT Insan Harapan belum menyusun laporan keberlanjutan yang berdiri sendiri. Meskipun demikian, sejumlah praktik pengelolaan Dana BOS memiliki keterkaitan dengan prinsip keberlanjutan, terutama dalam penggunaan anggaran, pemenuhan kebutuhan pembelajaran, dan pemeliharaan fasilitas sekolah. Untuk menganalisis praktik tersebut, penelitian menggunakan tiga dimensi keberlanjutan, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan.

1. Dimensi Ekonomi

Pada dimensi ekonomi, penggunaan Dana BOS di SMA IT Insan Harapan direncanakan berdasarkan kebutuhan dan prioritas sekolah. Penyusunan RKAS menjadi dasar dalam menentukan alokasi anggaran untuk kegiatan pembelajaran, pemeliharaan sarana dan prasarana, daya dan jasa, kegiatan ekstrakurikuler, serta kebutuhan operasional lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Guru juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan kebutuhan pembelajaran sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan anggaran.

Dalam pelaksanaannya, pencatatan transaksi dan penggunaan ARKAS membantu sekolah mendokumentasikan perencanaan serta realisasi penggunaan dana. Bukti transaksi, seperti nota dan kuitansi, juga digunakan untuk mendukung proses penatausahaan dan pertanggungjawaban. Praktik tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan Dana BOS telah diarahkan untuk mendukung kebutuhan operasional sekolah melalui mekanisme perencanaan dan pencatatan administratif.

Temuan ini sejalan dengan Barus et al. (2025), yang membahas keterkaitan tata kelola keuangan dan peningkatan mutu pendidikan. Theoline et al. (2025) juga menyoroti peran Dana BOS dalam mendukung mutu pendidikan, terutama melalui fasilitas, proses pembelajaran, dan tata kelola pendidikan. Kedua penelitian tersebut memberikan landasan untuk memahami pentingnya menghubungkan pengelolaan dana dengan kebutuhan dan manfaat program pendidikan.

Meskipun demikian, kesesuaian antara perencanaan dan pencatatan realisasi anggaran belum cukup untuk menyimpulkan bahwa penggunaan Dana BOS telah mencapai efisiensi ekonomi secara optimal. Penilaian efisiensi membutuhkan informasi yang dapat menunjukkan hubungan antara anggaran yang digunakan, kebutuhan yang dipenuhi, dan hasil yang diperoleh. Dalam penelitian ini, informasi mengenai dampak jangka panjang dan indikator manfaat yang terukur masih terbatas. Oleh karena itu, praktik yang ditemukan lebih tepat dipahami sebagai upaya mendukung keteraturan pengelolaan sumber daya keuangan, bukan sebagai bukti bahwa efisiensi telah tercapai secara terukur.

Pengembangan dimensi ekonomi dapat dilakukan melalui dokumentasi hasil program, evaluasi kesesuaian pengeluaran dengan kebutuhan, serta penilaian manfaat kegiatan yang didanai. Dengan demikian, informasi keuangan tidak hanya digunakan untuk menunjukkan besarnya realisasi anggaran, tetapi juga untuk

menjelaskan kontribusi penggunaan dana terhadap keberlangsungan program pendidikan.

2. Dimensi Sosial

Dimensi sosial tercermin dalam dukungan Dana BOS terhadap pelaksanaan pembelajaran, penyediaan fasilitas, kegiatan pendidikan, dan pengembangan kompetensi guru. Berdasarkan keterangan informan dalam penelitian, program yang didanai Dana BOS membantu mendukung kegiatan sekolah dan memenuhi kebutuhan pembelajaran siswa. Orang tua atau wali siswa juga menyampaikan bahwa manfaat program dapat dirasakan melalui kegiatan dan fasilitas yang tersedia bagi peserta didik.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan Dana BOS memiliki keterkaitan dengan keberlangsungan layanan pendidikan. Namun, manfaat yang dirasakan oleh informan belum dengan sendirinya membuktikan peningkatan hasil belajar atau pemerataan kualitas pendidikan. Hasil penelitian ini lebih tepat diinterpretasikan sebagai indikasi bahwa Dana BOS mendukung terselenggaranya kegiatan pendidikan.

Untuk menilai dampak sosial secara lebih terukur, sekolah dapat mengembangkan indikator sesuai dengan tujuan program, misalnya jumlah kegiatan pembelajaran yang terlaksana, pemanfaatan fasilitas, partisipasi siswa, atau pelaksanaan program pengembangan kompetensi guru. Penggunaan indikator tersebut perlu disesuaikan dengan data yang benar-benar tersedia dan tidak boleh dianggap sebagai hasil penelitian apabila belum diukur.

Dengan demikian, dimensi sosial tidak hanya berkaitan dengan terlaksananya kegiatan, tetapi juga dengan kemampuan sekolah mendokumentasikan penerima manfaat, pemerataan layanan, dan hasil program secara berkelanjutan.

3. Dimensi Lingkungan

Pada dimensi lingkungan, praktik yang berkaitan dengan keberlanjutan di SMA IT Insan Harapan masih terbatas pada pemeliharaan sarana dan prasarana, efisiensi penggunaan bahan, serta kebiasaan menghemat sumber daya. Praktik tersebut menunjukkan adanya perhatian terhadap pemanfaatan sumber daya sekolah, tetapi belum didukung oleh program lingkungan yang terstruktur dan indikator khusus yang terukur.

Pemeliharaan fasilitas dan penghematan sumber daya dapat menjadi bagian dari upaya pengembangan pengelolaan sekolah yang lebih berkelanjutan. Namun, praktik tersebut belum cukup untuk menyimpulkan bahwa sekolah telah menghasilkan dampak lingkungan yang terukur. Penilaian yang lebih kuat membutuhkan dokumentasi kegiatan dan indikator yang relevan, seperti penggunaan energi atau air, pengurangan bahan habis pakai, maupun pengelolaan sampah apabila kegiatan tersebut benar-benar dilaksanakan dan datanya tersedia.

Oleh karena itu, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa praktik terkait lingkungan telah muncul secara terbatas dan berpotensi dikembangkan melalui pencatatan kegiatan serta penetapan indikator yang sesuai. Penerapan praktik tersebut juga perlu dibedakan dari pemenuhan seluruh standar pelaporan keberlanjutan yang dikembangkan oleh Global Reporting Initiative (GRI).

Secara keseluruhan, ketiga dimensi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan Dana BOS dapat dianalisis tidak hanya berdasarkan pencatatan dan

pertanggungjawaban anggaran, tetapi juga berdasarkan keterkaitannya dengan manfaat program pendidikan dan pemanfaatan sumber daya. Meskipun demikian, praktik yang ditemukan belum dapat disamakan dengan penerapan sistem pelaporan keberlanjutan secara formal.

Keberlanjutan Program Pendidikan

Dana BOS dinilai oleh seluruh informan sebagai penunjang penting keberlangsungan kegiatan operasional pendidikan. Kepala Sekolah menyatakan bahwa Dana BOS membantu mempertahankan kegiatan operasional dan program pendidikan yang dibutuhkan siswa, dan apabila digunakan berdasarkan prioritas serta dievaluasi secara berkala, dana tersebut dapat menjadi salah satu penunjang keberlangsungan program sekolah. Guru menambahkan bahwa program yang memberikan manfaat jangka panjang adalah program peningkatan kompetensi guru, penguatan literasi dan numerasi, penyediaan fasilitas pembelajaran, serta pengembangan karakter siswa, karena dampaknya tidak hanya dirasakan dalam satu kegiatan.

Baik Kepala Sekolah, Bendahara, maupun Guru sepakat bahwa penguatan yang paling dibutuhkan ke depan adalah evaluasi dampak jangka panjang dan penyusunan indikator manfaat yang lebih jelas, agar keputusan mengenai program mana yang perlu dilanjutkan tidak hanya didasarkan pada terserapnya anggaran, melainkan pada hasil dan manfaat nyata yang dihasilkan. Orang Tua/Wali Siswa turut menyampaikan harapan agar Dana BOS ke depannya terus dikelola secara transparan, tepat sasaran, dan disertai evaluasi manfaat program yang lebih terbuka bagi orang tua.

Pembahasan

1. Pengelolaan Dana BOS Berdasarkan Fungsi Manajemen POAC

Pengelolaan Dana BOS di SMA IT Insan Harapan dilakukan melalui perencanaan berbasis kebutuhan, pelaksanaan program, pencatatan transaksi, dan pengawasan internal. Penggunaan RKAS, aplikasi ARKAS, serta dokumen pendukung membantu keteraturan administrasi dan pertanggungjawaban dana. Temuan ini sejalan dengan Wijaya et al. (2024) dan Fadhilah et al. (2023) mengenai pentingnya tata kelola dalam pengelolaan Dana BOS. Namun, analisis fungsi POAC masih perlu memperjelas pembagian tugas dan tanggung jawab sebagai bagian dari fungsi Organizing.

2. Transparansi, Akuntabilitas, dan Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Transparansi dan akuntabilitas diwujudkan melalui pencatatan transaksi, laporan realisasi, dokumentasi pengeluaran, dan penyampaian informasi program. Akan tetapi, informasi rinci mengenai anggaran belum sepenuhnya mudah dipahami oleh semua pemangku kepentingan. Guru dapat menyampaikan kebutuhan pembelajaran, sedangkan komite dan orang tua lebih banyak berperan melalui masukan serta forum komunikasi. Temuan ini memperkuat pentingnya penyediaan informasi yang mudah dipahami dan mekanisme partisipasi yang sesuai dengan kewenangan setiap pihak (Sine et al., 2021; Permata & Mustoffa, 2023; Peng et al., 2024).

3. Penerapan Prinsip Keberlanjutan

SMA IT Insan Harapan belum menyusun laporan keberlanjutan secara formal. Meskipun demikian, praktik pengelolaan Dana BOS dapat dianalisis melalui dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kerangka Global Reporting Initiative

(GRI) digunakan sebagai perspektif analisis, bukan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa sekolah telah memenuhi seluruh standar pelaporan GRI. Brown et al. (2009) dan Hörisch et al. (2020) memberikan landasan untuk menghubungkan pengungkapan informasi dengan pertanggungjawaban organisasi kepada pemangku kepentingan.

a. Dimensi ekonomi

Penggunaan Dana BOS direncanakan berdasarkan kebutuhan dan prioritas sekolah, sedangkan RKAS, ARKAS, dan bukti transaksi mendukung pencatatan serta penelusuran penggunaan dana. Temuan ini berkaitan dengan pembahasan Barus et al. (2025) dan Theoline et al. (2025) mengenai tata kelola dana pendidikan dan mutu layanan pendidikan. Namun, keteraturan administrasi belum membuktikan tercapainya efisiensi ekonomi karena penelitian belum menyediakan pengukuran yang menghubungkan biaya, kebutuhan yang dipenuhi, dan hasil program.

b. Dimensi sosial

Dana BOS mendukung pelaksanaan pembelajaran, penyediaan fasilitas, kegiatan pendidikan, dan pengembangan kompetensi guru. Temuan ini sejalan dengan Theoline et al. (2025) serta perspektif Peng et al. (2024) mengenai pentingnya manfaat pendidikan dan keterlibatan pemangku kepentingan. Namun, manfaat yang dirasakan informan belum membuktikan peningkatan hasil belajar atau pemerataan kualitas pendidikan. Evaluasi lebih lanjut memerlukan indikator yang relevan, seperti pelaksanaan kegiatan, pemanfaatan fasilitas, dan hasil program yang dapat ditelusuri.

c. Dimensi lingkungan

Praktik terkait lingkungan masih terbatas pada pemeliharaan sarana dan prasarana serta penghematan sumber daya. Praktik tersebut berpotensi dikembangkan melalui dokumentasi kegiatan dan indikator yang sesuai. Akan tetapi, tanpa data mengenai pelaksanaan dan dampaknya, penelitian ini belum dapat menyimpulkan bahwa pengelolaan Dana BOS menghasilkan kinerja lingkungan yang terukur.

Secara keseluruhan, ketiga dimensi tersebut memperluas analisis pengelolaan Dana BOS dari pencatatan keuangan menuju perhatian terhadap manfaat pendidikan dan pemanfaatan sumber daya. Namun, bukti yang tersedia belum cukup untuk menilai dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan secara terukur.

4. Pelaporan Keberlanjutan dan Implikasi bagi Program Pendidikan

Belum adanya laporan keberlanjutan tersendiri menunjukkan bahwa pelaporan di SMA IT Insan Harapan masih berorientasi pada pertanggungjawaban administratif dan keuangan. Informasi mengenai manfaat program dan dampak jangka panjang belum terdokumentasi secara terpadu.

Ceulemans et al. (2015) membahas pelaporan keberlanjutan dalam pendidikan tinggi dan kaitannya dengan perubahan organisasi serta keterlibatan pemangku kepentingan. Meskipun konteksnya berbeda, kajian tersebut dapat menjadi rujukan konseptual untuk mengembangkan pelaporan yang sesuai dengan karakteristik sekolah. Pengembangan dapat dimulai dengan mengintegrasikan data RKAS, ARKAS, dan laporan realisasi dengan dokumentasi program, penerima manfaat, hasil kegiatan, serta kendala pelaksanaan.

Dari sisi praktis, sekolah perlu mengembangkan indikator yang sederhana, relevan, dan dapat ditelusuri sumber datanya. Keterlibatan komite dan penyampaian informasi yang mudah dipahami juga perlu diperkuat agar evaluasi program tidak hanya bertumpu pada perspektif pengelola internal. Dengan menggabungkan informasi keuangan, hasil program, dan masukan pemangku kepentingan, sekolah dapat memiliki dasar yang lebih baik untuk menentukan program yang perlu dilanjutkan atau diperbaiki.

Secara teoretis, integrasi POAC, teori *stakeholder*, dan dimensi keberlanjutan membantu menjelaskan hubungan antara proses pengelolaan dana, kebutuhan pemangku kepentingan, dan manfaat program pendidikan. Namun, penelitian ini terbatas pada studi kasus SMA IT Insan Harapan dan belum mengukur efisiensi anggaran, dampak lingkungan, atau perubahan hasil belajar jangka panjang. Oleh karena itu, temuan lebih tepat dipahami sebagai gambaran kontekstual mengenai praktik tata kelola Dana BOS dan peluang pengembangan pelaporan keberlanjutan, bukan sebagai bukti bahwa seluruh dampak keberlanjutan telah tercapai.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMA IT Insan Harapan telah diarahkan pada pemenuhan kebutuhan operasional dan keberlangsungan program pendidikan melalui perencanaan berbasis kebutuhan, pelaksanaan kegiatan, pencatatan transaksi, serta penyusunan laporan pertanggungjawaban. Penggunaan RKAS, ARKAS, dan dokumen pendukung membantu mendukung keteraturan administrasi dan akuntabilitas pengelolaan dana. Namun, transparansi masih perlu ditingkatkan melalui penyajian informasi anggaran dan realisasi yang lebih rinci serta mudah dipahami oleh pemangku kepentingan.

Keterlibatan pemangku kepentingan belum merata pada seluruh tahapan pengelolaan Dana BOS. Guru memiliki kesempatan menyampaikan kebutuhan pembelajaran, sedangkan komite sekolah dan orang tua atau wali siswa lebih banyak berperan melalui pemberian masukan dan penerimaan informasi. Dari perspektif keberlanjutan, penggunaan Dana BOS berkaitan dengan dukungan terhadap kebutuhan operasional dan kegiatan pembelajaran. Namun, dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan belum dapat dinilai secara terukur karena keterbatasan indikator dan dokumentasi hasil program. Sekolah juga belum menyusun laporan keberlanjutan yang mengintegrasikan ketiga dimensi tersebut secara sistematis.

Oleh karena itu, sekolah perlu memperkuat transparansi dan partisipasi pemangku kepentingan serta mengembangkan indikator untuk mendokumentasikan manfaat program pendidikan. Integrasi informasi keuangan dengan hasil kegiatan dan penerima manfaat dapat membantu evaluasi program secara lebih terarah. Temuan ini terbatas pada studi kasus SMA IT Insan Harapan dan tidak dimaksudkan sebagai penilaian audit atas kepatuhan seluruh transaksi Dana BOS.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Barus, R., Ahmad, M., & Rochimah, H. (2025). Efektivitas dan transparansi pengelolaan dana untuk peningkatan mutu pendidikan: Systematic literature review dan sintesis tematik. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Citra Bakti*, 12(4), 1001–1016. <https://doi.org/10.38048/jipcb.v12i4.5808>

- [2] Brown, H. S., de Jong, M., & Levy, D. L. (2009). Building institutions based on information disclosure: Lessons from GRI's sustainability reporting. *Journal of Cleaner Production*, 17(6), 571–580. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2008.12.009>
- [3] Ceulemans, K., Molderez, I., & Van Liedekerke, L. (2015). Sustainability reporting in higher education: A comprehensive review of the recent literature and paths for further research. *Journal of Cleaner Production*, 106, 127–143. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2014.09.052>
- [4] Fadhilah, K. U., Lating, A. I. S., Sidarta, A., & Rabbani, S. F. R. (2023). Pengaruh penerapan good school governance terhadap efektivitas pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah di Surabaya. *Jurnal Buana Akuntansi*, 8(2), 151–167. <https://doi.org/10.36805/akuntansi.v8i2.5646>
- [5] Global Reporting Initiative. (2021). *GRI standards 2021*. Global Reporting Initiative.
- [6] Global Reporting Initiative. (2023). *GRI universal standards 2023*. Global Reporting Initiative.
- [7] Hörisch, J., Schaltegger, S., & Freeman, R. E. (2020). Integrating stakeholder theory and sustainability accounting: A conceptual synthesis. *Journal of Cleaner Production*, 275, Article 124097. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.124097>
- [8] Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2023). *Petunjuk teknis pengelolaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP)*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- [9] Lozano, R., Ceulemans, K., & Scarff Seatter, C. (2015). Sustainability reporting in higher education: Interconnecting the reporting process and organisational change management for sustainability. *Sustainability*, 7(7), 8881–8903. <https://doi.org/10.3390/su7078881>
- [10] Mardiasmo. (2023). *Akuntansi sektor publik*. Andi.
- [11] Peng, Y., Alias, B. S., & Mansor, A. N. (2024). Application of stakeholder theory in education management: A comprehensive systematic literature review (SLR). *International Journal of Learning, Teaching and Educational Research*, 23(6), 1–31. <https://doi.org/10.26803/ijlter.23.6.1>
- [12] Permata, I. Y., & Mustoffa, A. F. (2023). Implementasi akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana BOS terhadap RKAS SMP Sunan Kalijaga. *BALANCE: Economic, Business, Management and Accounting Journal*, 20(2), 124–131. <https://doi.org/10.30651/blc.v20i2.18220>
- [13] Sine, E. P., Tunti, M. E. D., & Rafael, S. J. M. (2021). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (Studi pada sekolah di Kota Kupang). *Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas*, 9(1), 1–8. <https://doi.org/10.35508/jak.v9i1.3925>
- [14] Theoline, E., Ahmad, M., & Soraya, E. (2025). Efektivitas dana BOS dalam meningkatkan mutu pendidikan dasar: Analisis literatur empiris tahun 2015–2025. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 10(2), 746–752.
- [15] Wijaya, A. A., Supriyanto, S., Asih, M. S., & Nurkolis, N. (2024). Analysis of the effectiveness of management of school operational assistance funds in elementary schools. *Lembaran Ilmu Kependidikan*, 53(2), 233–242. <https://doi.org/10.15294/lik.v53i2.5285>